

**IMPLEMENTATION OF THE WORK PLAN BETWEEN BADAN KEAMANAN
LAUT REPBULIK INDONESIA AND THE U.S. COAST GUARD**

Oleh : Helen Juwita Sari
Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si.

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes how the implementation of the work plan between the Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia and the United States Coast Guard (USCG). Indonesia as a country which is the fulcrum of two oceans, has an obligation to build maritime strength, in order to maintain maritime sovereignty and wealth as well as a form of state responsibility in maintaining shipping safety and maritime security. This is also in line with Indonesia's Vision, namely the Vision of Becoming a World Maritime Axis. There are many maritime threats such as IUU (Illegal Unregulated Unreported Fishing), transnational crimes, separatism, as well as territorial violations and border conflicts. One of Indonesia's efforts to overcome this is to form a Maritime Security Agency. To increase Bakamla's capability, maritime security cooperation was carried out with the United States, in this case cooperation between Bakamla and USCG.

This research uses qualitative research methods, with data collection techniques, namely literature studies originating from books, journals, reports, documents, newspapers, internet sites, and reports. This study uses the perspective of Neorealism and the theory of International Cooperation and the concept of Policy Implementation.

The implementation of the work plan between Bakamla and USCG went well and the activities carried out were in accordance with the contents of the work plan. There is a decrease in the number of violations at sea which is evidence of an increase in maritime security and safety in Indonesia.

Keywords: World Maritime Axis, Bakamla, USCG.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan kepulauan terbesar di antara benua Asia dan Australia dan merupakan penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas teritorial laut dan perairan pedalaman sekitar 2,7 juta kilometer persegi, yang setara dengan sekitar 70% dari total luas Indonesia. Setelah ditambah luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebesar 3,1 juta kilometer persegi, maka luas yurisdiksi Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi.¹ Luas laut Indonesia sangat luas, dan sumber daya alam lautnya tentu saja sangat kaya. Laut merupakan sumber penting perekonomian Indonesia.

Pada 13 November 2014, Presiden Joko Widodo mengusulkan konsep Poros Maritim Dunia (PMD) pada KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar. Presiden RI menyatakan bahwa kemaritiman merupakan pusat pembangunan pada abad ke-21. Berikut 5 pilar utama yang digarisbawahi oleh Poros Lautan Dunia (PMD)², yaitu:

1. Budaya laut: Reformasi budaya maritim Indonesia mendefinisikan identitas nasional bangsa maritim Indonesia.

2. Ekonomi maritim: Pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut negara.
3. Koneksi maritim: Prioritas akan diberikan pada pembangunan infrastruktur maritim, sarana transportasi dan infrastruktur, dan wisata bahari.
4. Diplomasi maritim: Menggunakan *soft power* untuk memerangi ancaman regional dan memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dalam isu-isu maritim.
5. Keamanan maritim: Persiapkan *hard power*, perkuat kekuatan pertahanan laut Indonesia dan pertahankan wilayah Indonesia.

Pencapaian 5 pilar PMD memang sulit, dan perairan Indonesia kerap menjadi sasaran kegiatan ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan tersebut biasa disebut sebagai ancaman maritim dan berbentuk IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported Fishing*), separatisme, kejahatan transnasional, pelanggaran batas wilayah dan konflik perbatasan.³ Tahun 2015 *International Maritime Bureau* (IMB) menyatakan dalam laporannya terdapat 246 laporan perampokan dan perompakan kapal laut di seluruh dunia. Indonesia menempati urutan pertama dengan 108 laporan. Hal ini membuat perairan Indonesia rawan terhadap kejahatan maritim.⁴ Bukti lebih lanjut dari

¹ Syaiful Anwar, *Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut*. Jurnal Pertahanan. Vol. 6 No. 3, 2016. diakses melalui <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/315/190> diakses tanggal 02 Juli 2020 pukul 14.00 WIB

² CSIS, *Southeast Asia from Scott Circle*, Vol. 5. (Washington DC: CSIS, 2014), https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/141126_SoutheastAsia_Vol_5_Issue_24.pdf

³ Latifah Dinda Larasati, *Tantangan Internal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Jurnal Hubungan Internasional, No. 2, (Malang, 2017), <https://ejournal.unair.ac.id/JHI/article/download/7307/442/2>, (diakses pada 22 Agustus 2020)

⁴ Anta Nasution, *Ancaman Keamanan Maritim Indonesia*, <https://ruangrakyat.com/ancaman-keamanan-maritim-indonesia/>, (diakses pada 10 Oktober 2020)

meningkatnya ancaman maritim di Indonesia adalah bahwa total 488 kapal pelaku *illegal fishing* ditangkap oleh KKP di perairan Indonesia pada akhir tahun 2018 dan 81 kapal penangkap ikan pada tahun 2019.⁵

Indonesia harus mampu mengatasi ancaman-ancaman tersebut demi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, serta menjamin keamanan maritim Indonesia. Dalam mengamankan wilayah maritim Indonesia, tentu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni serta sarana prasarana yang memadai. Dalam hal pengelolaan sumber daya bidang kelautan, Indonesia melibatkan 12 instansi yaitu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Keuangan (DepKeu), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Perhubungan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polisi Perairan dan yang terakhir adalah Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).⁶

BAKAMLA merupakan pembaharuan nama Badan Koordinasi Keamanan Laut yang diperintahkan melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005. Perubahan ini diikuti dengan perubahan sistem kelembagaan dari sistem multi lembaga⁷ menjadi sistem

terpadu yaitu penggunaan suatu lembaga untuk tugas dan wewenang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pada 8 Desember 2014, Indonesia menghidupkan kembali Bakorkamla sebagai Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), memberikan kewenangan yang lebih luas kepada badan tersebut untuk mengendalikan segala jenis kejahatan di laut. Hal ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan PMD.

Tulisan ini akan difokuskan pada satu instansi yaitu BAKAMLA. Untuk menjaga keamanan maritim Indonesia, sangat penting untuk mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Hal itu membuat Indonesia melakukan kerjasama dengan salah satu negara yang juga mempunyai perhatian khusus di bidang maritim yakni AS yang disebut salah satu negara maritim sebab melakukan manajemen pembangunan wilayah perairan secara bersungguh-sungguh, komprehensif, terencana dan berkesinambungan.⁸

Tahun 2015 Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani *MoU* kerjasama maritim, yang mana didalam kerjasama tersebut beberapa bidang kerjasama yaitu⁹:

1. Keamanan Maritim

atau lembaga yang bersama-sama untuk mencapai dan menyelesaikan masalah yang sama.

⁸ A. Kadar, *Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Jurnal Keamanan, Vol. 1, No. 3, 2015, <https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/download/33/26> , (diakses tanggal 02 Juli 2020)

⁹ Memorandum Saling Pengertian Tentang Kerja Sama Maritim antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2015-0345.pdf> , (diakses tanggal 5 Juli 2020)

⁵ 51 Kapal Asing Dimusnahkan Demi Memerangi *Illegal Fishing*, <https://www.dw.com/id/51-kapal-asing-dimusnahkan-demi-memerangi-illegal-fishing/a-48612744>, (diakses pada 10 Oktober 2020)

⁶ Latifah Dinda Larasati, op. cit. hlm. 211

⁷ *Multy Agent System* yaitu suatu sistem kelembagaan yang terdapat lebih dari satu institusi

2. Ekonomi Maritim
3. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan
4. Keselamatan dan Navigasi Maritim
5. Ilmu dan Teknologi Kelautan
6. Program yang ditentukan oleh kedua belah pihak dan bidang kerja sama lainnya

Pada tahun 2016 juga ditandatangani Rencana Aksi Kerjasama Maritim 2016-2020 yang isinya mempengaruhi rencana kerja Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu bidang kerja sama antar negara menyangkut keamanan maritim. Paragraf pertama berbunyi: "Penguatan kerjasama antara Badan Keamanan Maritim (Bakamla) dan USCG akan mempromosikan institusi dan kemampuan untuk keamanan maritim dan penegakan hukum, dengan fokus pada kepemimpinan organisasi yang efektif, kapasitas manusia dan kemampuan teknis."¹⁰. Terlihat dari rencana kegiatan menaruh perhatian ke *Coast Guard*. Bakamla memiliki fungsi yang sama dengan *Coast Guard*. Tahun 2017 dilakukan penandatanganan rencana kerja antara Bakamla RI dan *U.S. Coast Guard*, yang mana merupakan pelaksanaan dari *MoU* tentang Kerja Sama Maritim antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.¹¹

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, penulis mengambil pertanyaan penelitian yaitu ***Bagaimana***

¹⁰*Plan of Action on Maritime Cooperation 2016-2020*,

<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2016-0352.pdf> , (diakses pada 5 Juli 2020)

¹¹ Rencana Kerja antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Penjaga Pantai Amerika Serikat,

<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2017-0359.pdf> , (diakses tanggal 20 Juli 2020)

implementasi rencana kerja antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan U.S. Coast Guard.

KERANGKA TEORI

Teori Kerjasama Internasional

Neorealis melihat kerjasama internasional sebagai sesuatu yang sangat memungkinkan, namun neorealis skeptis dengan kemungkinan realisasinya karena pada hakekatnya negara akan mengedepankan kepentingan negaranya. Terkait capaian neorealis memandang negara akan bertindak rasional dengan mempertimbangkan apa yang akan dicapai, dan berfokus kepada siapa yang lebih banyak mendapat keuntungan (*absolute gains*). Neorealis berpendapat bahwa prioritas tujuan negara adalah keamanan nasional dimana *survival* menjadi tujuan paling tinggi dari suatu negara.¹²

Kerjasama internasional terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Kerjasama Bilateral yaitu perjanjian ini hanya dilaksanakan dua negara dan sifatnya kontraktual.
2. Kerjasama Regional yaitu perjanjian ini dilaksanakan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*.
3. Kerjasama Multilateral yaitu perjanjian ini dilaksanakan oleh negara-negara dan tidak terbatas pada wilayah tertentu, bersifat

¹² Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Persepektif Klasik*, (Surabaya : CSGS), 2016, 114

internasional dan bersifat *Law Making Treaty*.

Beberapa alasan negara untuk bekerja sama adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dimana dengan bekerjasama, negara dapat menekan biaya yang harus ditanggung karena keterbatasan negara tersebut dalam memproduksi produk yang dibutuhkan oleh penduduknya.
2. Upaya peningkatan efisiensi dalam kaitannya dengan penghematan biaya.
3. Terdapat masalah yang membahayakan keamanan bersama.
4. Pengurangan kerugian negatif yang terjadi karena tindakan individu pemerintah yang berpengaruh ke negara lain.¹³

Kerjasama Keamanan

Sejatinya kerjasama keamanan berbeda dengan bantuan keamanan. Bantuan keamanan lebih cenderung pada pertolongan yang diberikan untuk keamanan, sedangkan kerjasama keamanan yang mana juga berisi bantuan keamanan, tetapi lebih mencakup kategori kegiatan seperti latihan gabungan, pelatihan gabungan, pendidikan gabungan, kontak militer ke militer, bantuan kemanusiaan, dan operasi informasi.

Kerjasama keamanan meliputi bantuan pembangunan dan kemanusiaan yang fokus pada peningkatan pemerintah asing untuk menjaga warga negaranya. Tidak selamanya kerjasama keamanan selalu dan hanya berkaitan dengan

¹³ *Ibid*, hlm. 32-33, (diakses tanggal 23 Juli 2020)

kemampuan militer. Keberadaan militer dalam kerjasama keamanan tetap ada namun telah mengalami perkembangan yang memunculkan kepentingan keamanan yang lebih spesifik. Akhirnya perkembangan kerjasama keamanan bertujuan demi mengarahkan pihak-pihak yang berperan dalam menegakkan keamanan untuk lebih tanggap dalam mengatasi ancaman-ancaman non-tradisional, termasuk ancaman-ancaman non-negara. Dalam hal ini kerjasama keamanan dianggap sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk membentuk ruang pertempuran strategis dengan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan dan pertahanan.

Kepercayaan yang ada dalam suatu kerjasama keamanan memiliki tujuan objektif, kelangsungan hidup nasional, serta tujuan dan aktivitas dari negara-negara lain, yang sulit untuk menciptakan kedamaian dengan gagasan keamanan yang dijamin secara eksklusif oleh self-help. Dengan begitu, kerjasama keamanan dianggap merupakan hal yang tepat dalam menciptakan keamanan daripada keamanan yang diciptakan mandiri.

Konsep Implementasi Kebijakan

George Edward III berpendapat bahwa sukses tidaknya pengimplementasian kebijakan dipengaruhi empat faktor, faktor itu adalah komunikasi, sumber daya, sikap dari implementor & struktur birokrasi dari implementor.¹⁴

¹⁴ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*, (Gorontalo: UNG Press), 2015, 63

a. Komunikasi

Penegakan kebijakan efektif ketika mereka yang bertanggung jawab atas proses penegakan kebijakan memahami apa yang perlu dilakukan. Petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan secara jelas, singkat dan konsisten kepada penanggung jawab pelaksanaan. Kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman pada implementor apabila petunjuk dan perintah kebijakan tidak disampaikan dengan jelas dan spesifik oleh pembuat kebijakan. Kondisi tersebut juga membuat implementor tidak memahami deskripsi tugas yang harus dilakukannya. Akhirnya kebijakan yang diinginkan tidak dapat diimplementasikan oleh implementor. Maka dari itu tergambar pentingnya faktor komunikasi yang dalam hal ini komunikasi berbentuk vertikal. Maka dari itu tergambar pentingnya faktor komunikasi yang dalam hal ini komunikasi berbentuk vertikal supaya implementor kebijakan paham dengan pasti tentang yang akan dikerjakan oleh mereka. Dalam komunikasi yang berkaitan dengan penyampaian pesan informasi politik, harus diperhatikan bentuk komunikasi organisasi, yang biasanya terbagi ke dua bentuk, yakni komunikasi formal & komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi terencana dan dirancang dengan sadar melalui saluran resmi organisasi publik dan terhubung dengan saluran yang ditetapkan pada struktur organisasi. Sedangkan komunikasi informal, di sisi lain, yaitu komunikasi di luar struktur organisasi publik melalui saluran informal dan hasil dari kebutuhan, hubungan interpersonal yang baik atau kepentingan bersama.¹⁵

¹⁵ Ibid, 64-65

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam hal implementasi kebijakan meliputi staf ahli sesuai dengan yang dibutuhkan, informasi tentang penegakan kebijakan dan perubahan yang dibuat untuk mereka yang terlibat dalam penegakan kebijakan, kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan ditegakkan untuk tujuan tertentu, dan sarana dan prasarana. (Bangunan, peralatan, tanah dan persediaan). Faktor sumber daya bukan sekedar jumlah sumber daya manusia atau personel akan tetapi juga kapasitas dan motivasinya dalam mendukung implementasi kebijakan.¹⁶

c. Sikap Pelaksana

Sikap Pelaksana dalam hal implementasi kebijakan berarti bahwa para implementor harus memiliki keinginan dan cenderung bersikap positif dalam melakukan kebijakan itu. Seringnya implementor akan menggunakan kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang salah satunya dikarenakan independensi pribadi terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Selain itu kompleksitas masalah dari suatu kebijakan juga membuat implementor melihat kebijakan bergantung pada bagaimana sikap mereka terhadap kebijakan tersebut, terkait dampak kebijakan tersebut pada kepentingan individu bahkan organisasi mereka.¹⁷

d. Struktur Birokrasi

Ciri utama birokrasi yaitu standar operasional prosedur (SOP) serta fragmentasi. SOP merupakan pengembangan kebutuhan internal yang berkaitan dengan keamanan waktu,

¹⁶ Ibid, 66

¹⁷ Ibid, 67

sumber daya serta kebutuhan dari kesatuan pada organisasi kerja yang bersifat kompleks. Faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain jelas atau tidak jelasnya SOP (terkait mekanisme, sistem serta aturan implementasi kebijakan), pendistribusian kewajiban pokok, fungsi serta wewenang, tanggung jawab antar aktor dan hubungan yang harmonis antar organisasi pelaksana.

Fragmentasi yaitu pembagian tanggung jawab politik antara beberapa lembaga berbeda, yang butuh adanya koordinasi. Struktur birokrasi terfragmentasi/terdesentralisasi menyebabkan kegagalan komunikasi karena potensi kesalahan penanganan instruksi tinggi. Tingginya tingkat terdistorsi pengaplikasian suatu kebijakan, maka diperlukan koordinasi yang semakin intens.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN Keamanan Maritim Indonesia

Djuanda mendeklarasikan Indonesia menjadi negara kepulauan (*archipelagic state*) tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut bertujuan untuk memulihkan sektor maritim Indonesia yang banyak mengalami kerusakan di masa kolonialisme. Djuanda berhasil memperjuangkan Indonesia demi mendapat pengakuan internasional sebagai negara kepulauan seperti yang tercantum dalam UNCLOS 1982.¹⁹

¹⁸Ibid, 69

¹⁹ Shinta Ulwiya, "Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara," ITS, <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/> (diakses pada 14 Maret, 2021 pukul 13:00 WIB).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan seperti negara maritim lain tentunya membutuhkan kebijakan maritim yang kuat guna menangani masalah terkait maritim serta mengoptimalkan keuntungan sebagai negara maritim. Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan poros maritim dunia bertujuan menguatkan kembali potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan gambaran dari pandangan/sikap tentang geografis Indonesia di masa Presiden Soekarno yaitu wawasan nusantara.

Pada KTT Asia Timur (EAS) ke-9 pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Joko Widodo menegaskan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang akan menjadi fokus pembangunan Indonesia. Poros Maritim Dunia terdiri dari 5 pilar utama yaitu:²⁰

- 1) Kebangkitan kembali budaya maritim Indonesia
- 2) Pelestarian sumber daya alam laut dengan menitikberatkan pada pembangunan kedaulatan hasil laut, dengan nelayan sebagai pilar utama.
- 3) Mengutamakan pembangunan infrastruktur dan penghubung transportasi laut melalui pembangunan jalur laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan dan pariwisata bahari.
- 4) Menggunakan diplomasi maritim dengan membuat usulan

²⁰ Alex Dungal dan Emral Ferdiansyah, "Pidato Lengkap Jokowi Mengenai Poros Maritim Dunia," <https://investor.id/archive/pidato-lengkap-jokowi-mengenai-poros-maritim-dunia> (diakses pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 13:32 WIB).

peningkatan kerjasama maritim dan upaya mengatasi sumber konflik seperti perburuan ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut dengan garis besar bahwa laut patut menyatukan berbagai bangsa dan negara, tidak memisahkan.

- 5) Pengembangan kekuatan laut sebagai tanggung jawab pemeliharaan navigasi dan keselamatan di laut.

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Pada Tahun 1972 dibentuk suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut melalui Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung dan Kemudian pada tahun 2003 direorganisasi dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di bidang keamanan maritim, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 dibentuklah Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Pada tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan Dasar Hukum BAKORKAMLA yang mana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA).²¹

²¹ Muhammad Ridha Iswardhana dkk., "Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, no. 5 (2021): 1419

Bertepatan dengan Hari Nusantara, pada tanggal 15 Desember 2014, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla).²² Pembentukan Bakamla merupakan salah satu contoh langkah menuju terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana Bakamla pada awalnya ditetapkan sebagai Badan Koordinasi Keamanan Laut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 dan dipaparkan lebih jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014.²³

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Keamanan Laut dibentuk untuk mengawasi penegakan hukum di perairan teritorial dan wilayah yurisdiksi, terkhusus dalam pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah tersebut. khususnya pada saat melakukan patroli keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Badan Keamanan Maritim bertanggung jawab dan menjalankan fungsi Penjaga Pantai seperti penjaga keamanan maritim, pengawasan maritim, dan komponen pertahanan strategis.²⁴

UU 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Keamanan Laut adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator. Misi Badan

²² *Ibid*

²³ Laporan Kinerja Bakamla tahun 2020

²⁴ *Ibid*

Keamanan Laut adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Menurut Undang-undang tersebut, Badan Keamanan Laut memiliki beberapa fungsi yaitu:²⁵

1. Penyusun kebijakan nasional terkait keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia;
2. Penyelenggara sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia;
3. Pelaksana penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan oleh instansi terlibat;
4. Pemberi bantuan teknis dan operasional kepada otoritas terkait;
5. Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
6. Pemenuhan tugas lain dalam sistem pertahanan negara.

Badan Keamanan Laut yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Bakamla adalah badan resmi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan di perairan

Indonesia. Berikut misi yang dimiliki oleh Bakamla:²⁶

1. Untuk meningkatkan pengawasan, pemantauan, pencegahan, dan penegakkan hukum di perairan Indonesia;
2. Untuk memperkuat peraturan nasional Indonesia tentang keamanan dan keselamatan maritim Indonesia;
3. Terbentuknya sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan maritim di Indonesia.

Adapun kewenangan yang dimiliki Bakamla yang dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu komando adalah:

1. Melaksanakan pengejaran seketika (*hot pursuit*);
2. Penghentian, penyidikan, penahanan, pemindahan dan pemindahan kapal kepada instansi berwenang terkait untuk diproses lebih lanjut;
3. Integrasi sistem informasi keamanan juga keselamatan di perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia.

Badan Keamanan Laut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

²⁵ Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

²⁶ IMIC, "Biweekly Report," January (2021): 2.

Jumlah personel Bakamla RI ditahun 2020 adalah sebanyak 873 personel. Sebagai badan yang berpusat pada pengamanan laut, Fungsi operasional Bakamla tidak terpusat di kantor pusat, melainkan ada tiga zona laut yaitu Kantor Kamla Kawasan Maritim Barat di Batam, Kantor Kamla Kawasan Laut Tengah di Manado dan Kantor Kamla Kawasan Maritim Timur di Ambon. Kantor Kamla Zona Maritim tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan keamanan dan keselamatan laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tertentu berdasarkan kewenangannya.

Bakamla bertanggung jawab atas wilayah Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 43 tentang Wilayah Negara, Wilayah Laut Indonesia, Perairan Indonesia meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Sedangkan Yurisdiksi Indonesia yaitu Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas dan Kawasan dasar laut internasional.²⁷

Sejalan dengan tujuan menjadi poros maritim dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, kuat, dan maritim yang berdampak positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan global, Bakamla fokus untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:²⁸

1. Mengamankan *Choke Point* di Perairan Indonesia;

2. Menjamin Keamanan di ALKI;
3. Menjaga Kedaulatan Indonesia;
4. Menegakkan Hukum di Perairan Indonesia;
5. Memberikan rasa aman pada pelaku bisnis di laut demi kesejahteraan rakyat;
6. Mencapai visi poros maritim dunia.

Bakamla sebagaimana berfungsi untuk mensinergikan operasi, juga pembagian sumber daya dan tenaga kerja dari seluruh kementerian/lembaga kemaritiman lainnya. Dalam pelaksanaannya, petugas dari beberapa kementerian/lembaga maritim kerap ikut bergabung dalam kapal Bakamla dalam melakukan operasi penegakan hukum di laut. Bentuk lain pelaksanaannya yaitu beberapa kementerian/lembaga maritim tersebut akan mengirimkan petugas dari pihak masing – masing ke kantor Bakamla dan menjadikan petugas tersebut penghubung permanen dalam mengkoordinasikan patroli. Nantinya jika petugas tersebut memerlukan aset dan personel tambahan dari Bakamla maka Bakamla harus memenuhi permintaan tersebut. Akan tetapi karena Bakamla memiliki kapasitas yang terbatas serta personel yang sedikit, maka Bakamla yang kerap meminta aset dan personel dari instansi maritim lain. Mengenai kewenangan Bakamla, terdapat permasalahan karena Bakamla hanya dapat menyerahkan kapal yang mencurigakan kepada otoritas terkait dan Bakamla tidak memiliki kewenangan

²⁷ Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2020-2024

²⁸ *Ibid*

penyidikan.²⁹ Dengan melakukan patroli keamanan serta keselamatan di perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla berperan untuk menjaga, memantau, mencegah dan menindak pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Bakamla mendirikan Unit Penindakan Hukum (UPH) yang representatif dalam praktiknya mendeskripsikan keterlibatan dari *stakeholder* menangani perkara berdasarkan tangkapan dari pelaksanaan operasi keamanan serta keselamatan laut.³⁰

Bakamla di tahun 2016 memiliki kurang dari 30 kapal, 2 stasiun darat, 14 stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut, dan 3 markas radar zona regional.

Implementasi Rencana Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Penjaga Pantai Amerika Serikat/USCG

Pada tahun 2018 Bakamla dan USCG melakukan pertemuan di Indonesia untuk membahas lebih lanjut tentang kerjasama antara Bakamla dan USCG. Dalam pertemuan tersebut ditetapkan *Record of Discussion* (RoD). Namun RoD tidak di publikasikan oleh kedua pihak karena bersifat rahasia. Berikut rangkuman implementasi rencana kerja Bakamla dan USCG dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Terdapat berbagai kegiatan dalam rencana kerja Bakamla dan USCG yang bertujuan sebagai pembangunan kapasitas terkait keamanan dan keselamatan maritim, penegakan hukum, serta melindungi lingkungan laut dengan fokus pada manajemen organisasi, kapasitas dari sumber daya manusia, serta keterampilan teknis tertentu. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan bersama antara Bakamla dan USCG, Workshop, pertukaran ahli di berbagai bidang.

1. Public Affairs Practitioners Workshop

Pada 19 Maret 2018 personel Bakamla menghadiri kegiatan Pelatihan Public Affairs Practitioners Workshop yang diselenggarakan oleh USCG di USCG D14, Honolulu, Hawaii. Kegiatan ini ditaja untuk mewedahi pertukaran informasi dari personel pelaksana fungsi kehumasan antara instansi coast guard terkhusus di kawasan Asia Tenggara.

2. Pelatihan Boarding Party Officer Mobile Training Team (MTT)

Kegiatan Boarding Party Officer Mobile Training Team (MTT) merupakan bentuk implementasi dari rencana kerja antara Bakamla dan USCG. Kegiatan tersebut dilakukan sejak tanggal 4 sampai dengan 15 Februari 2019 di Perairan Tanjung Uncang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini berbentuk pemberian materi, praktek langsung di kapal, dan gladi manuver di laut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan Tim Pemeriksa Kapal dalam melakukan tugas berdasarkan Prosedur Operasional Teknis

²⁹ Nazili Abdul Azis, dkk., "Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 (UNDIP, 2016), 10

³⁰ Bakamla, *Rencana Strategis Badan Keamanan Laut RI, 2020-2024*

serta Taktis untuk menyokong operasi yang akan dilakukan Bakamla.³¹

3. Pelatihan Small Boat Operations (SBO)

Pelatihan yang bernama Small Boat Operations ditaja oleh International Trainings Division USCG dilaksanakan di Ruang Latihan KN. Tanjung Datu 1101, Batam. Terdapat 16 personel Bakamla mengikuti kegiatan ini. Peserta tersebut meliputi Staf Latihan Operasi Laut, Para Pengawak Kapal, Staf Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Staf Latihan Operasi Udara Maritim, Staf Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Batam, serta Staf Pangkalan Armada Kamla Batam.

4. Pelatihan Small Boat Operations (SBO) II

Pelatihan *Small Boat Operation II* merupakan pelatihan yang berguna dalam peningkatan serta penguatan kelembagaan dan sumber daya terkhusus yaitu para awak kapal dalam patroli. Pelatihan SBO II dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau yang dimulai sejak 1 sampai 12 Juli 2019. Latihan ini dilakukan dengan metode berupa teori dan praktek terkait tanggung jawab dari awak kapal, stabilitas kapal, navigasi dasar, sistem navigasi dan pengaturan navigasi. Latihan tersebut diikuti oleh 10 ABK KN Tanjung Datu 301 juga 6 personel dari Zona Kamla Barat. Pihak USCG, personel *Mobile Training Team* (MTT) dikerahkan dalam kegiatan tersebut, yang mana mempunyai

³¹ Admin, "Tingkatkan Kemampuan, Bakamla RI Gelar Boarding Party Officer – MTT Bersama USCG," Bakamla, bakamla.go.id (diakses pada 22 Oktober 2021)

kapabilitas terkait pengoperasian kapal kecil terkhusus *Rigis Hull Inflatable Boat* (RHIB).³²

5. Pelatihan Incident Command System Mobile Training Team

Pelatihan *Incident Command System* (ICS) antara Bakamla dan USCG merupakan kegiatan yang berbicara tentang skenario operasi laut, membangun sistem penanganan insiden. Bakamla dan Stakeholder yang hadir (Basarnas, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan Polair) diuji dalam kemampuan untuk menata bentuk operasi laut yang digabungkan dengan pusat komando dan pengaturan berada di darat. Kegiatan tersebut memberi pemahaman lebih lanjut terkait pola perencanaan dan nantinya akan digarap dalam Sistem Koordinasi dan Pusat Operasi Darurat. Perencanaan diawali dari penataan pola perencanaan aktivitas dalam penanganan insiden awal, hingga pada rencana aktivitas insiden terakhir. Dalam kegiatan ini diharapkan peserta dapat mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi sifat dan instruksi tanggungjawab terpadu, serta ikut dalam bimbingan insiden awal, hingga dengan masa evaluasi.³³

³² Admin, "Bakamla Menggelar Latihan Bersama Dengan USCG Kamis," TNI, 4 Juli 2019, <https://tni.mil.id/view-154117-bakamla-menggelar-latihan-bersama-dengan-uscg.html> (diakses pada 24 Oktober 2021)

³³ Admin, "Latihan Bersama Incident Command System Dengan Mobile Training Team USCG," Bakamla, 10 Juli 2019, <https://bakamla.go.id/berita/read/0.9172519398082531> (diakses pada 24 Oktober 2021)

6. Latihan Bersama Bakamla dan USCG Cutter Stratton

Bakamla menyambut kedatangan kapal USCG *Cutter Stratton* ke Dermaga Batu Ampar Batam pada tanggal 9 Agustus 2019 untuk memeriahkan 70 tahun hubungan diplomasi antara Indonesia dengan AS serta demi melaksanakan *training* bersama. Hal ini bertujuan demi memajukan keamanan dan keselamatan, perlindungan sektor maritim serta *information sharing*. Dalam kunjungan tersebut, Bakamla dan USCG saling mengenalkan dan mengunjungi kapal yang dipakai dalam latihan bersama tersebut. Bakamla menggunakan KN Tanjung Datu 301 dan USCG yang menggunakan Cutter Stratton yang akan digunakan dalam latihan bersama kepada USCG.

7. Konsultasi Tingkat Senior dan Dialog Secara Berkala

Bentuk kegiatan yang diagendakan dalam rencana kerja antara bakamla dan USCG salah satunya adalah konsultasi tingkat senior dan dialog yang dilakukan secara berkala. Tercatat bahwa bakamla dan USCG saling mengunjungi markas satu sama lain, baik itu untuk membahas tentang agenda kerjasama maupun terkait isu-isu keamanan.

8. Kunjungan Bakamla ke Amerika Serikat

Demi memperkuat kerja sama antara Bakamla dan USCG, Kepala Bakamla memimpin Delegasi Bakamla dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Kunjungan tersebut diawali dengan kunjungan Bakamla ke USCG Training

Center di Yorktown, Virginia pada tanggal 9 Juli 2019.

SIMPULAN

Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat pada sektor keamanan maritim didapati terjadi perkembangan dari tahun ke tahun selanjutnya. Berawal dari kerjasama maritim dan ditandatangani pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan disepakatinya rencana kerja dalam kerjasama maritim tersebut pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017 di sepakatinya rencana kerja antara Bakamla RI dan *United States Coast Guard*. Yang mana rencana kerja antara Bakamla dan USCG tersebut merupakan kelanjutan dari salah satu poin kerjasama yaitu keamanan maritim dalam kerjasama maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Impelementasi kerjasama antara Bakamla dan USCG berjalan dengan baik dan sesuai dengan isi dari rencana kerja yang telah ditetapkan kedua pihak. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan George Edward III, faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam kerjasama antara bakamla dan USCG telah terpenuhi dengan baik, namun adanya hambatan ketika munculnya wabah Covid-19. Hal ini merupakan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi dan mengancam sumber daya khususnya personel pelaksana dalam implementasi kerjasama, hal itu menyebabkan tidak terpenuhinya faktor sumber daya.

Terdapat peningkatan dalam keamanan maritim Indonesia terlihat dari grafik jumlah pelanggaran (grafik 2.2) bahwa trend pelanggaran hukum sejak

tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya, jumlah intensitas kegiatan operasi sektor keamanan serta keselamatan di laut yang meningkat, total personel bakamla yang berpartisipasi dalam pelatihan juga mengalami kenaikan, dan presentase penyerahan/pelimpahan perkara kasus tindak pidana yang bertambah.

Referensi

- Anwar, Syaiful. "Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut". *Jurnal Pertahanan*, Vol. 6 No. 3. (2016).
- Gunawan, Michelle Vicky. "Peran Amerika Serikat Dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia tahun 2009-2019." *UPH Journal of International Relations*: 27. Vol 11 no 21 2019
- Iswardhana, Muhammad Ridha dkk. "Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, no. 5 (2021): 1416
- Kadar, A. "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Keamanan*, Vol. 1 No. 3. (2015).
- "Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Jamaluddin Iskandar". *Jurnal Idaarah*, Vol. 1 No. 1. (2017).
- Latifah & Dinda Larasati. "Tantangan Internal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Hubungan Internasional*, No. 2. (2017).
- Masdiana, Abdurrahman. "Penguatan Keamanan Maritim Indonesia : Memahami Ancaman Keamanan Maritim dan Rekonstruksi Kemaritiman Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia, Gema Keadilan". Vol, 4. No. 1. (2017).
- Nugraha, Muhammad Harry Riana dan Arfin Sudirman. "*Maritime Diplomacy* Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia." *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 1, no. 2. (2016)
- Nindyarizki, Novia., Marsetio, dan Abdul Rivai RAS. "Perubahan Geomaritim Kawasan Pasca Restrukturisasi US Pasific Command Terhadap Keamanan Maritim Indonesia." *Jurnal Keamanan Maritim* 7, no. 1 (2021)
- Ricardo, Muhammad Richie. "Kepentingan Kebijakan Politik Luar Negeri *Freedom of Navigation* Amerika Serikat Terhadap Sengketa di Kawasan Laut China Selatan." *JOM FISIP UNRI*, Vol 6, Edisi II. (Juli, 2019)
- Wibowo, Wahyu. "Kemaritiman Indonesia: Sebuah Kajian Kritis". *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, Vol. 4 No. 2. (2017).

Buku:

- Anak Agung Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro. *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Agustino, L. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Dam, Syamsuar. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996.
- Dugis, Vinsensio. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Persepektif Klasik*. Surabaya : CSGS. 2016
- Edhy.P, Tedjo. *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2010.
- Evan A. Laksmana dkk. *Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi*. Jakarta: CSIS. 2018.
- Hall, Richard H. *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses, terjemahan Nganam Maksensius*. Yogyakarta: Amara Books. 2006
- Holsti, K.J. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga. 1988.
- Jaya, Indra. *Evaluasi Keamanan Laut Indonesia*. (Jakarta: ABM). 2012
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)* Gorontalo: UNG Pres. 2015
- Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Konsep Mainstreaming Ocean Policy kedalam Rencana Pembangunan Nasional*. 2014.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Diplomasi Indonesia 2014*. Jakarta: Direktorat Informasi dan Media. 2015.
- Klein, Natalie. *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. Great Briatin: Oxford University Press. 2010.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Edisi Revisi). Jakarta: LP3S. 1994.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta. 2007.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Terjemahan oleh Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2005.

- Siagian, P. *Filsafat Administrasi*, Jilid 1. Bandung: Penerbit Gramedia. 2006
- Slamet, Yulius. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, 2006.
- Sukatmat, Winarno. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Badan Penerbit IKIP. 1986.
- Sulistyaningtyas dkk. *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subadi, T. *Penelitian Kuantitatif*. University Press. 2006
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Terry, George R. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara. 2000
- Till, Geoffrey. *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass. 2004.
- Laporan Resmi:**
- Coast Guard Strategic Plan 2018-2022*
- Kemendagri. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. 28 Januari 2015.
- IMIC, “Biweekly Report.” January (2021): 2
- Peraturan Presiden RI Tentang Bakamla Nomor 178 tahun 2014
- Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2020-2024
- Treaty Kemlu. Memorandum Saling Pengertian Tentang Kerja Sama Maritim antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. 23-24 Oktober 2015.
- Treaty Kemlu. *Plan of Action on Maritime Cooperation 2016-2020*. 14 Oktober 2016.
- Treaty Kemlu. Rencana Kerja antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Penjaga Pantai Amerika Serikat. 4 Desember 2017
- US Coast Guard. “Doctrine for the US Coast Guard.” *US Coast Guard Publication*
- U.S. Department of Homeland Security, “Overview of the U.S. Coast Guard.” (2016)
- Internet:**
- 51 Kapal Asing Dimusnahkan Demi Memerangi Illegal Fishing. <https://www.dw.com/id/51-kapal-asing-dimusnahkan-demi-memerangi-illegal-fishing/a-48612744>. (diakses pada 10 Oktober 2020)
- Admin. “Timeline of Coast Guard Organization History.” USCG. <https://www.uscg.mil/lantarea/docs/> (diakses pada 20 Juli, 2022).

- Admin. "US Coast Guard." DHS. <https://www.dhs.gov/news/2012/05/16/remarks-secretary-janet-napolitano-us-coast-guard-academy-commencement>, (diakses pada 20 Juli, 2022).
- ADM Phil Davidson. "*The United States' Interest in the Indo-Pacific.*" *U.S. Indo-Pacific Command*, <https://www.pacom.mil/Media/Speeches-Testimony/Article/2085461/the-united-states-interests-in-the-indo-pacific/> (diakses pada 12 Juli 2022).
- Agustina, Dewi. *Global fire Power: Indonesia Peringkat ke-16 Terkuat di Dunia Bidang Militer.* (5 Oktober 2019). <https://www.tribunnews.com/internasional/2019/10/05/global-fire-power-indonesia-peringkat-ke-16-terkuat-di-dunia-bidang-militer?page=3>, (diakses tanggal 23 Juli 2020)
- Alex Dungkal dan Emral Ferdiansyah, "Pidato Lengkap Jokowi Mengenai Poros Maritim Dunia," <https://investor.id/archive/pidato-lengkap-jokowi-mengenai-poros-maritim-dunia> (diakses pada tanggal 14 Maret 2021)
- Ambari, M. *Kedaulatan Negara di Laut Bergantung pada Bakamla.* <https://www.mongabay.co.id/2019/05/13/kedaulatan-negara-di-laut-bergantung-pada-bakamla/>. (diakses pada 10 Oktober 2020)
- Arti *MoU (Memorandum of Understanding): Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya*, diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-mou.html> (diakses pada 17 Juli 2020)
- BBC. *Visi Pertahanan, Prabowo Kemakmuran, Jokowi Maritim.* (23 Juni 2014) diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140622_indonesia_debatcapres_dua diakses tanggal 03 juli 2020
- BcBatams. "Kunjungan Perwakilan EXBS di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam." Bcbatam. (14 Maret 2015) <http://bcbatam.beacukai.go.id/kunjungan-perwakilan-exbs-di-kantor-pelayanan-utama-bea-dan-cukai-tipe-b-batam/> (diakses pada 02 Juli, 2022)
- Budhy, Nicky Prameswary. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/662/jbptunikompp-gdl-nickyprame-33067-1-unikom_n-l.pdf. (diakses pada 10 Oktober 2020)
- CSIS. *Southeast Asia from Scott Circle.* Vol. 5. (2014). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/141126_SoutheastAsia_Vol_

- 5_Issue_24.pdf (diakses tanggal 23 Juli 2020)
- Dosen Pendidikan 2. *Sarana dan Prasarana*.
<https://www.dosenpendidikan.co.id/sarana-dan-prasarana/>
 (diakses pada 10 Oktober 2020)
- GoCoastGuard. *USCG: A Multi-Mission Force*.
<https://www.gocoastguard.com/about-the-coast-guard/discover-our-roles-missions> (diakses tanggal 23 Agustus 2020)
- <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-alifmangga-19775-9-10.bab-i.pdf> (diakses tanggal 23 Juli 2020)
- <http://repository.unpas.ac.id/44501/3/2.%20BAB%20II.docx> hlm. 23 (diakses tanggal 23 Juli 2020)
- Iriawan, Sony. *Bakamla-US Coast Guard Latihan Bersama Mobile Training Team*. (2019).
<https://teritorial.com/hankam/bakamla-us-coast-guard-latihan-bersama-mobile-training-team/>
 (diakses pada 10 Oktober 2020)
- Kementerian Pertahanan. “IUSSD XIII Eksplorasi Perspektif Baru bagi Kemanan Regional dan Global.” Kemhan Indonesia. (3 September 2015)
<https://www.kemhan.go.id/2015/09/03/iussd-xiii-eksplorasi-perspektif-baru-bagi-keamanan-regional-dan-global.html>
 (diakses pada 04 Juli, 2022)
- “Kerjasama AS-Indonesia di Bidang Maritim.” US Embassy.
<https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/> (diakses pada 04 Juli, 2022)
- Nasution, Anta. *Ancaman Keamanan Maritim Indonesia*.
<https://ruangrakyat.com/ancaman-keamanan-maritim-indonesia/>
 (diakses pada 10 Oktober 2020)
- Pengertian Kerjasama*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama> diakses pada 16 Juli 2020
- PresidenRI.go.id. 2015 (diakses pada 10 Februari 2022)
- Shelton, Greg. “The United States Coast Guard’s Law Enforcement Authority Under 14 USC Section 89 : Smuggler’ Blues or Boater Nightmare.” *William & Marry Law Review*, vol 34 Issue 3. (1993): 988.
- Sukarni dan Leonard Simanjuntak. *Kapasitas SDM Merupakan Kunci keberhasilan Pencapaian Kinerja*. Berita DJKN.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3723/Kapasitas-SDM-Merupakan-Kunci-keberhasilan-Pencapaian-Kinerja.html> (diakses pada 10 Oktober 2020)